

**KONGRUENSI VISI MISI HEBAT DALAM PENINGKATAN
EKONOMI KERAKYATAN DENGAN KEBIJAKAN OLEH WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI 2021-2024**

SKRIPSI

Oleh:

ULFI PURNAMA SEPTYANINGSIH

BP. 2010832013



Pembimbing:

Dr. Irawati, MA

Mhd Fajri, S.IP., MA

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

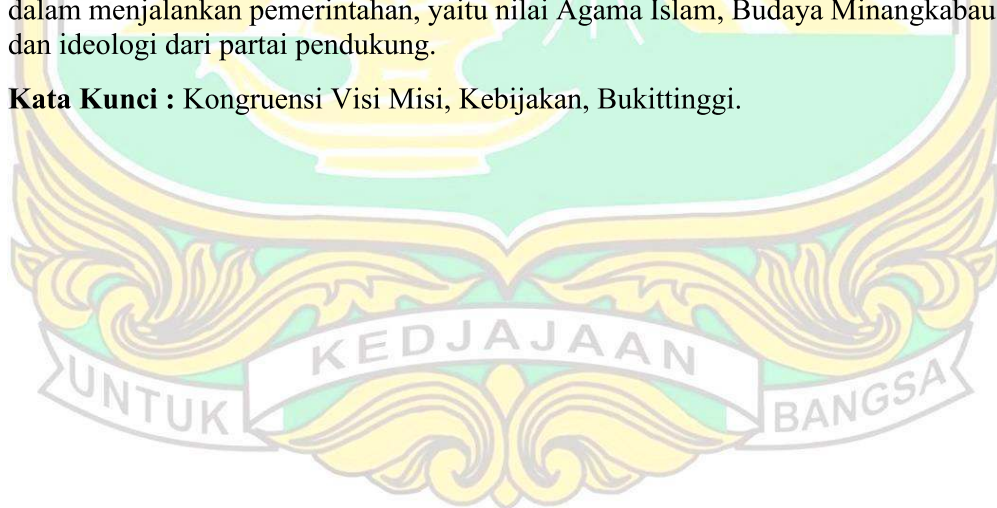
PADANG

2024

ABSTRAK

Kongruensi visi dan misi dengan kebijakan merupakan penelitian yang menilai perlunya untuk melihat kesesuaian antara janji semasa kampanye oleh calon Kepala Daerah dengan kebijakan yang dihasilkan setelah berhasil menduduki jabatan. Realisasi janji kampanye menjadi kebijakan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menjelaskan bahwa visi dan misi pasangan calon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan harus dapat dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila pasangan calon tersebut terpilih. Hal ini agar tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan. Hal ini tentu menuntut kepala daerah untuk merealisasikan janji kampanye yang dituangkan melalui visi dan misi ke dalam kebijakan. Namun dalam realisasinya, masih ada kontra dari masyarakat terkait realisasi janji yang diberikan, sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan *Saliency Theory*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yang dianalisis menggunakan model *agenda plus mandat* dan model ideologi mengindikasikan bahwa terdapat kongruensi antara janji kampanye dengan kebijakan yang dihasilkan. Dalam prosesnya juga terdapat pengaruh dari partai pendukung dalam mendukung kebijakan yang dicanangkan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya kongruensi antara visi dan misi peningkatan ekonomi kerakyatan dengan kebijakan. Dalam model *agenda plus mandat* terlihat adanya pengaruh pihak dari luar pemerintahan terhadap kebijakan. Selain itu dalam model ideologi yang dipercaya dalam menjalankan pemerintahan, yaitu nilai Agama Islam, Budaya Minangkabau, dan ideologi dari partai pendukung.

Kata Kunci : Kongruensi Visi Misi, Kebijakan, Bukittinggi.



ABSTRACT

Congruence of vision and mission with policy is a study that assesses the need to see the suitability between promises during the campaign by candidates for Regional Heads and the policies produced after successfully taking office. The realization of campaign promises into policies is regulated in Law Number 17 of 2007 concerning the National Long-Term Development Plan 2005-2025 which explains that the vision and mission of candidate pairs must refer to the National Long-Term Development Plan (RPJP) and must be described in the government work program if the candidate pair is elected. This is to be reflected in the National Medium-Term Development Plan (RPJM) and the Government Work Plan (RKP) which is an annual work plan. This certainly requires regional heads to realize the campaign promises outlined through the vision and mission into policy. However, in its realization, there are still cons from the community regarding the realization of the promises given, so further research is carried out using Saliency Theory. This research uses a qualitative approach with a case study research design. Data collection techniques were carried out in the form of interviews and documentation. The results of this study, which were analyzed using the agenda plus mandate model and the ideology model, indicate that there is congruence between campaign promises and the resulting policies. In the process, there is also the influence of supporting parties in supporting the proclaimed policies. So that in this study researchers found congruence between the vision and mission of improving the people's economy and policies. In the agenda plus mandate model, there is an influence of parties from outside the government on policy. In addition, in the ideology model that is trusted in running the government, namely the value of Islam, Minangkabau Culture, and the ideology of the supporting parties.

Keywords : *Vision and Mission Congruency, Policy, Bukittinggi.*

